



KEDUDUKAN OTONOMI DAERAH SEBAGAI PERAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Adrian Hoirul Iqsan

Manajemen, Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka

Jl. Raya Jakarta-Bogor No.KM.23 No.99, RT.4/RW.5, Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830

Korespondensi penulis : anadrian64@gmail.com

***Abstract** Development is a process of growth and change for the better. All development is aimed at improving people's welfare. Economic development is an effort to increase a country's total income and per capita income by tracking population growth. This research method uses qualitative methods, which specifically analyze and describe the relationship between regional autonomy and economic growth in Indonesia. Regional autonomy plays an important role in economic development, with good and correct implementation, development can be achieved optimally. Therefore, regional development is expected to have a positive impact on economic growth.*

***Keywords:** Regional Autonomy, Economic Development, Law, Regional Financial Autonomy*

Abstrak Pembangunan adalah suatu proses pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Segala pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan total dan pendapatan perkapita suatu negara dengan melacak pertumbuhan penduduk. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang secara spesifik menganalisis dan mendeskripsikan hubungan otonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Otonomi daerah berperan penting dalam pembangunan ekonomi, dengan pelaksanaan yang baik dan benar maka pembangunan dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, pengembangan wilayah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

***Kata Kunci:** Otonomi Daerah; Pembangunan Ekonomi; Hukum; Otonomi Keuangan Daerah*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia selalu dikaitkan dengan UUD 1945 salah satunya yang tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945 tentang bentuk negara dan Pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Prinsip penyelenggaraan dari otonomi daerah harus selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan perkembangan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat. Kegiatan administratif pemerintah daerah sangat ditentukan oleh derajat otonomi dan derajat intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Permasalahan umum yang muncul dalam pembahasan permasalahan pemerintahan daerah adalah permasalahan mata uang. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dikelola atau dimanfaatkan secara cermat agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan anggaran yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan penyelenggara pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk menciptakan perekonomian kerakyatan yang layak. Selain itu, daerah otonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf hidupnya dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi,

kesatuan, keadilan, dan keberagaman dalam kerangka negara republik Indonesia yang mencegah desentralisasi.

Desentralisasi bertujuan untuk memperlancar jalannya pemerintahan, karena Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, meliputi ribuan pulau besar dan kecil, serta penduduknya berbeda agama, budaya dan ras, oleh karena itu pemerintah pusat tidak dapat melakukan intervensi apapun. Dalam otonomi daerah, yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk mengatur diri sendiri, sedangkan kewajiban berarti hak untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Namun beberapa peneliti menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun hanya pada daerah tertentu saja.

KAJIAN TEORI

Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan sebuah gagasan yang memberikan kebebasan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber daya dan kepentingan daerah sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas dari daerah tertentu. Konsep ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, agar proaktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya di tingkat lokal. Di samping itu, maksud otonomi daerah adalah untuk mengeksplorasi segala potensi ekonomi yang ada di daerah.

Salah satu dampak yang diharapkan dari otonomi daerah adalah pertumbuhan perekonomian di daerah. Tetapi persoalan ini masih menjadi perbincangan di kalangan cendekiawan dan pelaku lapangan. Kawasan perbatasan merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan daripada kawasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Oleh sebab itu, perencanaan, pembangunan, dan peningkatan kawasan perbatasan sangat krusial untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Konsep Pembangunan Ekonomi

Negara maju dan berkembang yang meningkatkan pertumbuhan dan penggunaan harus mengatur pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa hal terkait keuntungan bagi bangsa saat ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu melalui investasi sumber daya manusia. Salah manfaat utamanya agar dapat meningkat adalah meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat umum.

Beberapa para ahli ekonomi berpendapat bahwa penciptaan investasi merupakan faktor krusial yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi dan pengembangan suatu negara. Apabila seorang pengusaha atau individu melakukan investasi, maka sejumlah aset tertentu akan diinvestasikan atau dikeluarkan, barang yang dibeli namun tidak dikonsumsi akan dimanfaatkan untuk produksi, sehingga terciptalah barang dan layanan di masa mendatang.

Ekonomi yang pesat akan memengaruhi investasi terutama penanaman modal asing, karena pertumbuhan ekonomi adalah sebagai salah satu petunjuk makroekonomi yang menjadi dasar penilaian investor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang secara spesifik menganalisis dan mendeskripsikan hubungan otonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang dikumpulkan dalam artikel ini dikumpulkan dari hasil penelitian sebelumnya di jurnal yang diakui. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci otonomi daerah, pembangunan ekonomi, hukum dan otonomi keuangan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan suatu wilayah bertujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk di wilayah perbatasan. Sedangkan otonomi daerah ialah keleluasaan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak pemerintah daerah untuk mengelola, mengatur, mengurus sumber-sumber serta kepentingan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan memberdayakan pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi perekonomian masing-masing daerah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memodernisasi sektor ekonomi diperkirakan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di seluruh Indonesia. Diharapkan melalui otonomi daerah, pemerintah daerah mampu memperkuat kebijakan pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan perekonomian bangsa secara komprehensif dan dilakukan dengan cara yang adil. Misalnya, wilayah dengan permukaan laut yang sangat rendah hal tersebut dapat

mendorong perhatian pada pengembangan sektor pertanian , perikanan, atau pertambangan yang sedang berkembang.

Ketidakpastian pasar mata uang regional memberikan indikasi mengenai segala potensi perekonomian suatu wilayah yang dapat digunakan untuk menentukan PDB - nya. Pendapatan primer daerah berbagai rasan pajak, rasan pajak, pendapatan dari usaha daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang terpisah. Argumen utama yang menyatakan bahwa daerah otonom dapat meningkatkan PDB per kapita seiring dengan menurunnya sumber daya alam. Dengan demikian, daerah otonom harus mempunyai kemauan dan kemampuan memanfaatkan nilai harian mata uang, serta kemampuan mentransfer dan memanfaatkan nilai harian mata uang secara efektif guna memperbaiki tata cara operasional daerah otonom.

Selain itu, kelompok otonomis daerah juga secara aktif berupaya memperkuat kerangka investasi yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk menerapkan kebijakan yang mendorong investasi di beberapa sektor dan membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk menilai efektivitas program desentralisasi dan otonomi pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi penduduk harus dipertimbangkan sebagai salah satu pilar utama. Tanpa inisiatif pembangunan ekonomi yang spesifik dari pemerintah daerah, maka daerah akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

Asas rule of law menekankan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan individu dalam mengarahkan pemerintahan. Oleh karenanya, prinsip-prinsip yang ditemukan dalam berbagai UUD harus kuat dan dilaksanakan melalui berbagai peraturan hukum yang mempengaruhi cara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Kemajuan ekonomi bukanlah satu-satunya unsur penting dalam pembangunan, melainkan pembangunan harus mampu membawa individu melampaui aspek finansial dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah daerah harus mampu menjadi koordinator pembangunan perekonomian di daerahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa peran pemerintah daerah semakin penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk pembangunan perekonomian.

KESIMPULAN

Hubungan antara otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah erat. Adanya hal tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, di mana harapan para penduduk lebih cepat diperhatikan dan diwujudkan sesuai dengan keinginan penduduk daerah. Pemerintah daerah menciptakan lebih banyak perusahaan yang dikelola oleh pemerintah atau swasta untuk mengurangi pendapatan daerah. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain anggaran perimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penetapan urutan program/proyek infrastruktur. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan perekonomian Indonesia dapat berjalan lancar dan dapat membawa atau memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiady, T., & Astawa, I. K. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 59-72.
- Bagianto, A., & Zulkarnaen, W. (2020). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 316-332.
- Tupan, T., & Setiorini, R. A. (2022). Narative Review Konten Publikasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Wilayah Perbatasan. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 14(1), 39-49.
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43-46.
- Nababan, J. H., & Shahrullah, R. S. (2021). PERANAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH. *Journal Of Law and Policy Transformation*, 6(2), 108-116.
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 113-128.